

BAB III

KEGAGALAN TRANSISI DEMOKRASI MESIR

Bab ini membahas mengenai tanda-tanda dari adanya kegagalan dalam proses transisi demokrasi yang terjadi di Mesir. Dalam rentang waktu setelah Muhammad Mursi dilantik hingga pada masa pemerintahan Abdul Fattah Al Sisi di tahun 2016. Beberapa kebijakan maupun sikap yang diambil mencerminkan bahwasanya pemerintah telah melenceng dari demokrasi.

A. Dominasi Ikhwanul Muslimin

Semasa pemerintahan Mubarak segala sesuatu terkait dengan kebijakan yang diambil sangat erat kaitannya dengan kepentingan Mubarak. Dominasi angkatan bersenjata pada saat itu menciptakan iklim yang tidak baik bagi keberlangsungan kehidupan demokrasi di negara Mesir. Militer yang merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk menjaga kedaulatan negara, justru mengendalikan pemerintahan dengan turut serta dalam dunia perpolitikan. Dominasi suatu golongan atau kelompok tertentu yang sangat kental pada era pemerintahan Mubarak seharusnya tidak kembali terulang pada masa pemerintahan setelah Mubarak. Pemerintahan yang bekerja untuk semua golongan demi kepentingan rakyat merupakan suatu hal yang diinginkan oleh rakyat Mesir.

Pada masa pemerintahan Presiden Mursi kelompok yang menonjol pada saat itu ialah Ikhwanul Muslimin (*Muslim Brotherhood*). Ikhwanul Muslimin melalui partainya yang bernama *Hizb al Hurayya wa al Adala* atau *the Freedom and Justice Party* (FJP) mulai muncul ke permukaan untuk mengikuti pemilu setelah rezim Mubarak berakhir (Zahid, 2012). Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan Al Bana bersama tokoh lainnya yakni Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz, Ahmad Al-Khusairi, Hafiz Abdul Hamid, dan Zaki Al Maghribi pada tahun 1928 di kota Ismailiyah, Mesir (Jatmika, 2014). Sebelum mendirikan

Ikhwanul Muslimin, Hasan Al Bana kerap melakukan aktifitasnya dalam berdakwah.

Tujuan dari didirikannya Ikhwanul Muslimin yang tercantum didalam angaran dasarnya ialah untuk berdakwah sesuai dengan ajaran islam yang benar, mensejahterakan masyarakat dengan menjaga kekayaan negara, meningkatkan taraf hidup dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahmat, 2006). Berdasarkan dari tujuan tersebut, Ikhwanul Muslimin berkeinginan agar suatu negara dapat dikelola dengan berlandaskan pada aturan-aturan sesuai dengan syariat Islam sehingga rakyat dapat menjadi sejahtera. Namun dalam prakteknya pergerakan Ikhwanul Muslimin dianggap sebagai kelompok ekstrimis yang dapat membahayakan negara.

Pada masa sebelum pemerintahan Presiden Muhammad Mursi, Ikhwanul Muslimin kerap dilarang keberadaannya oleh pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Banyak para anggota Ikhwanul Muslimin yang dipenjara serta bahkan dihukum mati. Sikap Ikhwanul Muslimin yang berseberangan dengan pemerintah dianggap sebagai hambatan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dalam melakukan penolakan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, Ikhwanul Muslimin tidak segan-segan untuk menyampaikannya langsung kepada pemerintah. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin kepada pemerintah merupakan hal yang lumrah dilakukan. Oleh karena itu terkait dengan pernyataan maupun sikap jika kebijakan yang diambil oleh pemerintah bertentangan dengan apa yang Ikhwanul Muslimin anut tentu pihak Ikhwanul Muslimin akan menentang kebijakan tersebut.

Di era Gammal Abdul Nasser yaitu pada tahun 1954 sampai tahun 1970. Keberadaan Ikhwanul Muslimin dilarang oleh pemerintah sebab dianggap menentang pemerintah yang menyuarakan nasionalisme dan sosialisme arab sekuler (Farida, 2014). Kebijakan pemerintah tidak hanya melarang keberadaan Ikhwanul Muslimin bahkan samapi dengan

membasmi kelompok ini hingga ke akar. Penangkapan ribuan anggota Ikhwanul Muslimin dilakukan untuk membredel Ikhwanul Muslimin agar eksistensinya tidak terlihat lagi. Beberapa pimpinan Ikhwanul Muslimin pada saat itu yaitu Sayyid Qutb, Abdul Fattah Ismail, dan Yusuf Hawwas dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Gammal Abdul Nasser. Pemerintahan Nasser yang berseberangan dengan ideologi yang dimiliki oleh Ikhwanul Muslimin mengakibatkan sering terjadinya benturan diantara keduanya. Sehingga untuk meredam pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan Ikhwanul Muslimin, Upaya penangkapan sejumlah aktivis Ikhwanul Muslimin kerap terjadi.

Pada tahun 1970 hingga 1981, di era kepemimpinan Presiden Anwar Sadat. Hubungan antara Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah tidak diwarnai banyak konflik seperti di era Presiden Gammal Abdul Nasser. Hal ini karena para pimpinan Ikhwanul Muslimin membawa Ikhwanul Muslimin untuk menjauh dari segala sesuatu yang dapat memicu konflik dengan pemerintah. Namun ketika kebijakan pemerintah dianggap meliberalisasi Mesir baik di sektor perekonomian maupun politik. Ikhwanul Muslimin kerap melakukan tindakan yang menunjukkan penolakan terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintahan yang dianggap pro terhadap Amerika Serikat tentunya tidak sejalan dengan Ikhwanul Muslimin. Di akhir-akhir pemerintahan Saddat terjadi beberapa kali demonstrasi yang ditujukan kepada pemerintah. Seperti aksi unjuk rasi yang dilakukan sebagai buntut dari kebijakan pemerintah yang melakukan pemotongan subsidi kepada rakyat. Ikhwanul Muslimin juga melakukan protes keras terhadap pemerintah yang menandatangani perjanjian *Camp David* yang berisi perjanjian damai antara Mesir dan Israel.

Pada tahun 1981, Presiden Anwar Sadat ditembak ketika sedang menonton parade militer di kota Kairo. Peristiwa tersebut sontak diakaitkan dengan kelompok Ikhwanul Muslimin. Sejumlah kalangan menganggap kelompok

Ikhwanul Muslimin sebagai dalang dari pembunuhan Presiden Sadat. Sebelum Sadat terbunuh, Ikhwanul Muslimin merupakan pihak yang getol menentang keputusan pemerintah terkait penandatanganan perjanjian damai antara Mesir dan Israel.

Pada era pemerintahan Presiden Mubarak, Ikhwanul Muslimin diakui sebagai organisasi keagamaan sehingga dengan begitu Ikhwanul Muslimin tidak diperbolehkan untuk berpolitik praktis. Tidak dipebolehkannya Ikhwanul Muslimin untuk berpolitik praktis menjadikan organisasi ini harus berkoalisi dengan partai oposisi lainnya agar para anggotanya dapat memasuki parlemen. Sepak terjang Ikhwanul Muslimin pada masa pemerintahan Hosni Mubarak bukan tanpa konfrontasi terhadap pemerintah. Sejumlah anggota Ikhwanul Muslimin juga ditangkap dan dipenjara oleh aparat keamanan karena dianggap ingin mendirikan negara Islam.

Setelah Presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri dari jabatannya akibat revolusi 18 hari pada tahun 2011. Eksistensi Ikhwanul Muslimin mulai dibangun. Sebab dalam proses revolusi tersebut pihak Ikhwanul Muslimin merupakan salah satu pihak yang getol untuk menuntut mundurnya Mubarak sebagai Presiden Mesir. Pihak Ikhwanul Muslimin yang menyerukan agar Mubarak turun dari jabatannya menggambarkan Ikhwanul Muslimin merupakan pihak yang menentang pemerintahan Mubarak.

Melalui sayap politiknya yakni FJP (*the Freedom and Justice Party*), Ikhwanul Muslimin berhasil memenangi pemilu yang dilaksanakan pasca rezim Hosni Mubarak. Hal ini merupakan sebuah penantian panjang dari Ikhwanul Muslimin. Yang mana pada masa pemerintahan sebelumnya, Ikhwanul Muslimin selalu menjadi pihak oposisi yang diburu oleh pemerintah. Pemilu yang dilaksanakan pada 16-17 Juni 2012 dimenangkan oleh FJP. Muhammad Mursi sebagai kader Ikhwanul Muslimin merupakan presiden pertama yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum yang sah. Ia

dilantik pada 30 Juni 2012 bertempat di Mahkamah Konstitusi Mesir. Mursi menjadi pemimpin baru Mesir setelah ia berhasil memenangkan pemilihan umum mengalahkan pesaingnya yakni Ahmad Shafiq yang merupakan Perdana Menteri terakhir di era kepemimpinan Presiden Hosni Mubarak. Mursi memenangi pemilihan umum dengan hasil 51,7 persen dari total jumlah surat suara yang masuk.

Gegap gempita keberhasilan Ikhwanul Muslimin dalam memenangi konstelasi pemilihan umum Mesir nampaknya tidak berlangsung lama. Presiden Mursi dikritik oleh sejumlah pihak karena menempatkan beberapa anggota Ikhwanul Muslimin di berbagai sektor pemerintahan Mesir. Keputusan yang diambil meskipun merupakan hak prerogatif Mursi sebagai seorang presiden, menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan. Dalam menyongsong demokrasi didalam suatu negara, selayaknya tidak mengistimewakan golongan tertentu untuk dijadikan anak emas bagi suatu pemerintahan.

Sejak munculnya Mohamed Morsi dan Ikhwanul Muslimin untuk berkuasa, program ekonomi yang dilaksanakan mirip dengan yang selama era Gamal Abdel Nasser dan Hosni Mubarak sebelum revolusi. Ini adalah kebijakan yang sama yang memainkan peran penting dalam menyatukan rakyat Mesir biasa untuk memimpin revolusi. Kebijakan-kebijakan ini tidak memperhatikan kepentingan rakyat dan standar hidup orang miskin. Pemerintah memberi keuntungan pada kepemimpinan Ikhwanul Muslimin, disukai para miliarder dan pemimpin militer seperti pada era Mubarak (Nasir, 2013). Warga biasa mulai mempertanyakan alasan mengapa mereka memulai revolusi di tempat pertama. Warga berjuang setiap hari dengan ekonomi hancur dan negara bangkrut, diganggu dengan korupsi sebagai orang Mesir menderita pemadaman harian dan antrian panjang untuk mendapatkan gas. Pemerintahan Morsi mulai menyerupai Mubarak.

Morsi tidak menyalahkan waktu ketika ia menunjuk anggota-anggota Ikhwanul Muslimin lainnya untuk memimpin kementerian-kementerian kunci, tanpa menghiraukan kritik oleh media ketika dia menindas media dan kelompok-kelompok yang tidak memiliki pandangan politik yang sama (Nasir, 2013). Ia memberi kelompok Islamis kontrol terhadap kementerian-kementerian pemerintah utama, termasuk pendidikan dan informasi. Setelah digulingkan, Morsi menggantikan tujuh belas gubernur provinsi; diganti tujuh dari mereka dengan anggota Ikhwanul Muslimin dan satu dengan anggota kelompok Islamis mantan militan, al-Gama'a al-Islamiyya. Bahkan tentara pun tidak aman ketika ia menggantikan para jenderal yang muncul sebagai ancaman terbesar terhadap otoritasnya dengan jenderal-jenderal baru yang akan menjawabnya. Selanjutnya, ia mengeluarkan deklarasi konstitusional deklarasi konstitusional yang memberinya kekuatan eksekutif penuh atas negara.

Di tingkat pemerintahan provinsi, Mursi mengangkat 17 orang gubernur baru pada 15 Juni 2013. Dari sejumlah tokoh yang ditunjuk oleh Mursi untuk menjadi gubernur yang baru. Terdapat 7 orang yang memiliki latar belakang Ikhwanul Muslimin. Keputusan ini mendapat kritikan keras dari berbagai kalangan. Para aktivis demokrasi menunjukkan bentuk protesnya di depan gedung pemerintah Provinsi Daqahliya salah satu provinsi dimana dipimpin oleh seorang gubernur yang berasal dari Ikhwanul Muslimin dengan membawa slogan “Gubernur Ikhwanul Muslimin tidak di terima” dan “Mengapa anda bergegas menuju akhir?” (Ahramonline, 2013). Di tempat lain yakni di Provinsi Monofiya, rakyat Mesir dari kalangan pemuda melakukan demonstrasi di depan kantor gubernur untuk mencegah agar gubernur baru memasuki kantornya. Para aktivis tersebut menilai pemerintahan Mursi yang diwarnai dengan banyaknya tokoh yang berlatarbelakang Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah blunder. Mursi telah membawa demokrasi Mesir yang baru tumbuh pasca revolusi 18 hari menuju akhir.

Nama-nama yang diangkat oleh Presiden Mursi untuk menjadi gubernur baru di beberapa provinsi di Mesir adalah Adel Abdel Moneim Hassan yang diangkat menjadi Gubernur Beni Suef, ia merupakan anggota terkemuka Partai Kebebasan dan Keadilan Ikhwanul Muslimin dan badan agungnya. Lelaki berusia 63 tahun itu juga merupakan Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan di Universitas Beni Suef. Selanjutnya adalah Sobhi Atteya Younis yang diangkat menjadi Gubernur Daqahliya, Younis adalah seorang anggota Ikhwanul Muslimin berusia 52 tahun. Ia adalah anggota pendiri Partai Kebebasan dan Keadilan dan telah menjadi profesor Arkeologi dan Sejarah di Universitas Mansoura sejak tahun 2009.

Provinsi Menoufiya dipimpin oleh Ahmed Shaarawi Mohamed, seorang, anggota Ikhwanul Muslimin terkemuka dan kepala divisi di Ikhwanul Muslimin. Yang keempat ialah Hossam Abul Ezz. Ia ditunjuk oleh Mursi untuk menjadi seorang gubernur di provinsi Qalioubiya. Ia adalah seorang pengusaha dan anggota biro panduan Ikhwanul Muslimin yang dilaporkan dekat dengan deputi pemimpin tertinggi pemimpin Khairat El Shater. El Ezz juga merupakan pendiri saluran televisi Ikhwanul Muslimin yakni Masr 25.

Kemudian yang diangkat menjadi gubernur adalah Ahmed El Beili yang menjadi gubernur untuk provinsi Gharbiya, ia adalah anggota Ikhwanul Muslimin yang ambil bagian dalam penyusunan konstitusi pasca revolusi Mesir. El Beili, yang lulus dengan gelar sarjana di bidang farmasi dari Universitas Alexandria pada tahun 1978, juga merupakan ketua komite pajak Persatuan Apoteker Umum. Presiden Mursi juga mengangkat Osama Ibrahim Suleiman untuk menjadi Gubernur Beheira, Suleiman adalah sekretaris jenderal Partai Kebebasan dan Keadilan di El Beheira sejak didirikan pada tahun 2011. Ia adalah seorang insinyur dan seorang pengusaha. Yang terakhir adalah Gaber Abdel-Salam Ibrahim yang ditunjuk sebagai Gubernur Fayoum. Ibrahim adalah seorang anggota terkemuka dari Partai Kebebasan dan Keadilan. Ia Lahir pada tahun 1958, Ibrahim adalah ketua

pengawas Yayasan Namaa untuk Penelitian dan Pengembangan di Fayoum.

Selain mengangkat tujuh gubernur baru yang memiliki latar belakang Ikhwanul Muslimin, Mursi juga mengangkat beberapa anggota Ikhwanul Muslimin di berbagai posisi pemerintahan. Posisi yang ditempati oleh kader Ikhwanul Muslimin adalah lima orang di berbagai kementerian, delapan orang di kantor presiden, 12 orang sebagai asisten pemerintahan, 13 orang ditempatkan di dewan Pemerintahan, serta 12 orang ditunjuk sebagai walikota (Armandhanu, 2013), Pengangkatan kader-kader Ikhwanul Muslimin oleh Mursi pada lembaga-lembaga penting yang ada di Mesir dianggap oleh beberapa pihak telah melencek dari jalur demokrasi yang seharusnya. Perluasan kekuasaan Ikhwanul Muslimin didalam berbagai sektor pemerintahan telah mengecewakan masyarakat Mesir

B. Pretorianisme

Negara pretorian adalah suatu negara dimana militer memiliki potensi untuk mendominasi sistem politik (Perlmutter, 1974). Proses politiknya mendukung perkembangan militer sebagai kelompok penguasa. Sehingga pihak angkatan bersenjata memiliki peranan penting dalam institusi politik. Di dalam negara pretorian, militer sering melakukan intervensi terhadap pemerintahan. Meskipun di negara non pretorian juga terkadang terdapat intervensi dari pihak militer, namun intervensi yang dilakukan tidak sesering pada pemerintahan pretorian yang dilakukan hampir di setiap pengambilan kebijakan pemerintahan.

Masuknya militer didalam kehidupan sosial di masyarakat. Dimana militer yang seharusnya memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan serta kedaulatan negara, justru turut berkecimpung didalam dunia politik pemerintahan. Kelompok militer tentu memiliki segala modal atau bantuan yang diperlukan untuk meraih kekuasaan di suatu negara.

Dengan terjunnya militer didalam suatu pemerintahan telah menjadikan kehidupan berdemokrasi menjadi tidak sehat. Sebab pemerintahan yang demokrasi didasarkan pada persetujuan dari rakyat, yang pada selanjutnya kekuasaan dari pemerintahan tersebut dipergunakan untuk kepentingan rakyat pula.

Menurut Amos Perlmutter ada dua tipe tentara pretorian yaitu tipe pemisah (*arbitrator*) dan tipe penguasa (*ruler*) (Perlmutter, 1974). Tentara pretorian tipe pemisah adalah tentara yang memiliki tenggat waktu dalam melakukan kontrol terhadap pemerintahan hingga pemerintahan tersebut dapat memasuki masa pemerintahan yang diterima sebagai rezim sipil. Perilaku dari tentara pretorian dengan tipe pemisah dapat diidentifikasi sebagai berikut menerima adanya beberapa orde sosial sebelum intervensi dari militer, kembali ke barak masing-masing apabila konflik sipil telah selesai dibereskan, menolak adanya organisasi politik militer, batasan waktu yang direncanakan oleh militer dalam berkuasa ialah hingga rezim alternatif yang diterima telah didirikan, menjunjung profesionalisme militer, metode operasi militer yang tersembunyi, dan adanya ketakutan terhadap balasan dari rakyat terhadap intervensi militer.

Perilaku antara tipe pemisah dan tipe penguasa tentunya bertolak belakang satu sama lainnya. Perilaku dari tentara pretorian dengan tipe penguasa dapat diidentifikasi sebagai berikut menolak adanya orde sosial sebelum intervensi oleh militer, militer tidak bersedia untuk kembali ke barak setelah konflik selesai, menerima adanya organisasi politik militer, tidak ada batasan waktu dalam berkuasa, tidak adanya profesionalisme militer, Metode operasi politik dilakukan secara terang-terangan, dan tidak ada ketakutan atas balasan rakyat atas intervensi militer.

Berdasarkan pada tipe tersebut pada masa transisi setelah tumbanganya rezim Mubarak. Pemerintahan Mesir yang dipegang oleh SCAF merupakan tipe pretorian pemisah.

Namun setelah terjadinya kudet terhadap Presiden Mursi yang dilakukan oleh pihak militer. Pretorian yang menguasai Mesir berubah menjadi tipe penguasa. Pemerintahan pretorian yang terjadi di era Mubarak kembali terjadi pada masa pemerintahan Abdul Fattah Al Sisi. Pasca dilantik menjadi presiden dengan kemenangan 96,9 persen suara pemilih. Abdul Fattah Al Sisi mengangkat gubernur baru untuk wilayah Mesir. Dari 27 Gubernur, Al Sisi menunjuk 19 orang jenderal untuk menjadi gubernur di 19 provinsi yang ada di Mesir. 19 orang jenderal tersebut berasal dari militer yang berjumlah 16 orang dan 2 orang dari kepolisian. Keputusan Al Sisi untuk mengangkat 19 orang jenderal tersebut menimbulkan kontroversi. Sebab dengan adanya keputusan tersebut berbagai kalangan menilai bahwasanya pemerintahan yang dipimpin oleh Al Sisi akan kembali seperti kepemimpinan Mubarak.

Bahkan beberapa pendiri petisi yang membuka jalan bagi pengusiran Mursi yang dimulai untuk pertama kalinya mempertanyakan para pemimpin yang telah mereka bantu untuk berkuasa. "Alasan kami untuk memberontak terhadap kedua rezim itu sama, jadi tidak tepat bagi gubernur untuk ditunjuk seperti ini," Hassan Shaheen, seorang penyelenggara pengajuan petisi, yang dikenal dengan nama Tamarrod, mengatakan, menurut surat kabar negara bagian Al Ahram. "Tidak tepat menggunakan tokoh di lembaga negara yang sudah terbukti tidak kompeten atau korup sebelum revolusi" (Kirkpatrick & Sheikh, 2013). Dengan menunjuk begitu banyak jenderal, pemerintah baru yang dibentuk oleh Jenderal Abdul Fattah Al Sisi juga kembali ke salah satu taktik yang populer di era Mubarak dengan menggunakan gubernur untuk menumbuhkan loyalitas para perwira tinggi.

Ekspansi Mesir yang sedang berlangsung dari yurisdiksi militer dengan dalih pembangunan ekonomi dan keamanan publik merupakan indikator lain bahwa revolusi ini mati (Aziz, 2016). Meskipun militer telah lama menjadi pemain utama dalam dunia politik di Mesir, rezim Presiden Abdul Fattah Al Sisi telah mempromosikan militer ke puncak pimpinan urusan

politik dan ekonomi Mesir. Sejalan dengan itu, telah terjadi ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pengadilan militer terhadap warga sipil untuk melayani kepentingan para jenderal militer yang mengatur negara.

Kekhawatiran atas percobaan warga sipil di pengadilan militer telah lama menjadi prioritas bagi komunitas hak asasi manusia Mesir. Didirikan oleh UU Nomor 25 tahun 1966, pengadilan militer digunakan secara luas oleh rezim Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat, dan Hosni Mubarak untuk para pembangkang politik. Sesuai dengan Pasal Nomor 6 Hukum Peradilan Militer, Mubarak sering melaksanakan kebijakannya untuk memindahkan warga sipil ke pengadilan militer ketika hukum darurat berlaku hampir tiga puluh tahun masa jabatannya. Akibatnya, di bawah Mubarak, pengadilan militer mengadili lebih dari 12.000 warga sipil. Sejak pemecatannya, jumlahnya hanya naik. pada tahun 2011 saja, Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata secara agresif menjalankan wewenang eksekutifnya untuk memerintahkan tambahan 12.000 warga sipil yang diadili di pengadilan militer untuk kejahatan mulai dari “premanisme” untuk menghina militer (Aziz, 2016). Setelah delapan belas bulan protes vokal, hukum darurat yang ditentang untuk mengesahkan pengadilan militer warga sipil berakhir pada Mei 2012. Ini menjelaskan mengapa rezim Mohamed Morsi tidak mengadili banyak pembangkang politik di pengadilan militer.

Sejak berkuasa, Sisi belum membutuhkan undang-undang darurat untuk melegalkan pengadilan militer warga sipil. Dukungan publik yang kuat dan ketiadaan parlemen memungkinkan Sisi mengeluarkan ratusan keputusan kepresidenan secara sepihak, banyak yang menggerogoti aturan hukum. Di antara mereka adalah hukum yang secara efektif menjamin peningkatan warga sipil yang diadili di pengadilan militer. Yang pertama datang pada 27 Oktober 2014, setelah serangan mematikan menewaskan 22 tentara di Sinai Utara. Sisi mengeluarkan UU Nomor 136 tahun 2014, yang memberi militer wewenang untuk melindungi fasilitas

publik dan negara selama dua tahun (Aziz, 2016). Pengadilan militer diberikan yurisdiksi atas dugaan kejahatan yang terjadi di lahan publik, termasuk menara dan stasiun listrik, pipa gas, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang tidak terdefinisi.

Beberapa minggu kemudian, Jaksa Penuntut Umum Hisham Barakat memerintahkan jaksa untuk meninjau file perkara yang berlaku yang termasuk dalam undang-undang baru dan merujuk mereka ke pengadilan militer. Setiap perselisihan atau kejahatan, tidak peduli sepele apa pun, akan diselesaikan oleh hakim militer yang tidak dibatasi oleh hak-hak dasar proses hukum yang diberikan di pengadilan sipil. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa dalam dua tahun sejak UU 136 disahkan, lebih dari 7.000 warga sipil telah diadili oleh militer, di mana 3.000 orang diadili dalam lima bulan pertama. Banyak terdakwa dituduh menjadi anggota Ikhwanul Muslimin atau mengambil bagian dalam unjuk rasa mahasiswa.

Ekspansi terbaru yurisdiksi militer dilakukan pada bulan Juni 2016, ketika Presiden Sisi memberi militer wewenang untuk mengawasi lahan publik hingga 2 kilometer dari jalan umum dan jalan raya negara. Dengan maksud ditujukan untuk mencegah serangan terhadap tanah milik negara, keputusan presiden mengizinkan pengadilan militer untuk mengadili para pelanggar. Tidak mau kalah dengan eksekutif hawkish, pada bulan Agustus 2016 parlemen baru menyetujui memperpanjang UU Nomor 136 tahun 2014 untuk tambahan lima tahun hingga 2021.

Ditambah dengan serangkaian amandemen Undang-Undang Hukum Militer yang menghitung properti dan lembaga negara sebagai properti militer, yurisdiksi pengadilan militer telah menjadi sangat luas. Bangunan, pabrik, perusahaan, atau jalan yang dimiliki oleh pemerintah telah diubah menjadi ruang militer yang melucuti pengadilan yurisdiksi biasa. Penyempitan atas hak proses hukum dan

kesetiaan yang dimiliki oleh militer peradilan militer kepada militer berarti dakwaan oleh pengadilan militer adalah jaminan yang hampir pasti dari keyakinan, terutama berbeda dengan pengadilan sipil yang relatif lebih independen. Meskipun Pasal 204 Konstitusi 2014 secara nominal memberikan kemerdekaan kepada pengadilan militer, Pasal 1 UU Kehakiman Militer memberikan suatu entitas administratif di dalam Kementerian Pertahanan otoritas untuk mengaturnya. Dengan demikian, perwira militer yang bertugas sebagai hakim dikekang oleh struktur dan budaya institusional dari kebebasan yang berarti.

Para advokat hak asasi manusia dan pengacara telah mengkritik kedua undang-undang itu karena melanggar Pasal 204 Konstitusi 2014, yang melarang pengadilan militer terhadap warga sipil (Aziz, 2016). Namun, Pasal 204 memiliki pengecualian yang luas untuk kejahatan yang mewakili serangan langsung terhadap apa pun yang berada di bawah otoritas militer. Ketika militer memperluas kegiatan ekonomi dan menggantikan pasukan keamanan internal dalam melindungi fasilitas umum, larangan konstitusional pengadilan militer terhadap warga sipil menjadi tidak berarti.

Pemerintah menggunakan hukum sebagai sarana untuk menjaga keamanan dan memperkuat pembangunan ekonomi. Namun klaim seperti itu dibantah oleh sejumlah pengadilan militer dari para pembangkang politik. Yang paling mencolok adalah penuntutan 26 pekerja sipil di Alexandria Shipyard Company, yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan, sebagai pembalasan atas protes mereka terhadap upah rendah dan prosedur kesehatan dan keselamatan yang tidak memadai pada Mei 2016. Prosesnya sedang dilakukan di luar publik. pemeriksaan di Pengadilan Militer Alexandria, dengan petugas intelijen yang melayani sebagai saksi.

Dorongan untuk mengadakan pengadilan militer yurisdiksi yang lebih besar atas warga sipil sebagian didorong oleh ambisi ekonomi militer. Segera setelah itu menggulingkan presiden terpilih Muhammad Mursi pada 4

Juli 2013, militer mulai mengubah perannya dari mengoperasikan ekonomi bayangan di samping untuk mengawasi proyek-proyek ekonomi besar. Pada saat Sisi terpilih dalam apa yang efektif referendum pada Mei 2014, militer telah menyubordinasi sektor swasta sebagai subkontraktor ekonomi, juga melayani sebagai kontraktor umum nasional.

Urusan militer yang sudah ada sebelumnya telah memperluas operasi mereka di berbagai industri, termasuk pertanian, hotel dan resor, manufaktur barang-barang konsumsi, dan perumahan. Akibatnya, properti publik dan lembaga publik kini berada di bawah sistem peradilan militer. Ketika peran militer Mesir dalam urusan sipil mengembang, demikian pula yurisdiksi pengadilan militer. Ribuan warga sipil tersapu ke dalam forum buram yang absen karena proses, menghalangi orang lain dari menantang hegemoni ekonomi militer dan pelanggaran politik.

Ketika jutaan orang Mesir turun ke jalan pada bulan Januari dan Februari 2011, menghentikan pengadilan militer terhadap warga sipil merupakan prioritas utama mereka untuk mempertahankan kebebasan dan martabat. Tetapi dengan undang-undang yang menghubungkan yurisdiksi pengadilan militer dengan meningkatnya dominasi angkatan bersenjata dalam ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia ini hanya akan bertambah buruk. Yang dipertaruhkan bukan hanya pengadilan warga sipil oleh pengadilan militer, tetapi aturan hukum di Mesir. Tanpa akses ke pengadilan sipil, hak proses hukum yang mendasar, dan hakim independen, hukum menjadi tunduk pada keinginan politik militer.

C. Dekrit Presiden Mursi

Pada 22 November 2011, Mursi mengeluarkan dekrit sebagai upayanya untuk menata ulang negara Mesir sehabis rentetan demonstrasi menuntut Mubarak turun. Terdapat beberapa poin perihal isi dari dekrit yang diterbitkan oleh

Mursi. Poin yang pertama adalah kembali melakukan penyelidikan dan peradilan kepada pihak elit politik atau pemerintah yang melakukan tindakan kejahatan terhadap masyarakat yang melakukan demonstrasi ketika revolusi 18 hari di masa silam berlangsung. Adanya ketidakadilan terhadap para demonstran yang dilakukan oleh pemerintah terdahulu perlu segera diurus tuntas guna dicarikan penyelesaiannya. Pelaku yang terbukti bersalah melakukan tindak kejahatan apalagi kejahatan tersebut dilakukan oleh badan eksekutif yang dalam hal ini ialah pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Tentu merupakan bentuk pelanggaran HAM berat serta bentuk kejahatan pemerintah. Seharusnya pemerintah berupaya untuk melakukan perlindungan kepada masyarakatnya sebagai satu kesatuan dalam membangun negara. Bukan malahan melakukan tindakan keji dengan tindakan-tindakan yang tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan didalamnya. Meredam suatu aksi demonstrasi dengan cara-cara represif yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya tidak terjadi, sebab rakyat sejatinya berhak untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada penguasa.

Mubarak yang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dengan adanya dekrit presiden ini berarti ia harus kembali diadili untuk kasus yang sama (Hanifa, 2012). Ia dianggap telah gagal dalam mencegah terjadinya pembunuhan atas para demonstran yang melakukan aksinya ketika revolusi berlangsung. Sama halnya dengan pejabat pemerintahan yang lain, tidak mendapat perbedaan perlakuan tanpa terkecuali. Siapapun yang turut serta terlibat harus diadili pula.

Poin kedua adalah segala sesuatu pernyataan yang terkait dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan dekrit yang telah ditetapkan, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Peraturan ini dimulai pada 30 November 2012 hingga konstitusi dan pemilihan parlemen baru diberlakukan. Adanya poin nomer dua ini merupakan salah satu dari beberapa poin yang memunculkan kritikan dari masyarakat. Karena menggambarkan pemerintahan Mursi sebagai

pemerintahan yang anti terhadap kritik. Poin ketiga yaitu presiden mengangkat jaksa agung dengan ketentuan masa jabatan dari jaksa agung ialah 4 tahun dengan usia maksimal 40 tahun. Poin keempat ialah RUU Konstitusi baru yang dirumuskan mempunyai masa maksimal yakni 6 bulan, terkandung didalam Pasal 60 berkenaan tentang Deklarasi Konstitusi yang dikeluarkan pada 30 Maret 2011.

Poin kelima, pemegang kekuasaan yudikatif tidak diperbolehkan melakukan pembubaran terhadap MPR dan Dewan Perumus Konstitusi. Tidak diperkenalkannya pihak yudikatif untuk membubarkan parlemen, telah menimbulkan spekulasi bahwa Mursi sedang ingin mengukuhkan kelompok pengusungnya. Yang mana parlemen pada era kepemimpinan Mursi didominasi oleh kelompok Ikhwanul Muslimin. Poin keenam, Presiden dapat mengambil tindakan tegas terhadap segala sesuatu yang dianggap dapat mengancam revolusi 25 Januari, kehidupan warga, kesatuan negara, keselamatan negara, atau menghalangi lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Poin terakhir adalah dekrit ini dicantumkan didalam koran resmi serta mulai diberlakukan pada 21 November 2012.

Deklarasi konstitusional yang dikeluarkan oleh Mursi secara sepihak telah mengimunitasi keputusannya dari pengawasan yudisial dan mendahului tantangan hukum terhadap proses konstitusional yang didominasi Islam (Revkin, 2012). Singkatnya, deklarasi tersebut membuat keputusan Mursi secara legal tidak tersentuh. Mursi, yang terpilih menjadi presiden Mesir pada bulan Juni di sebuah platform yang berjanji untuk membersihkan sisa-sisa rezim lama dari institusi negara, sekarang menerima isyarat langsung dari buku pedoman pendahulunya yang otoriter, Hosni Mubarak. Presiden telah berusaha untuk membenarkan deklarasi tersebut sebagai intervensi yang diperlukan untuk mengatasi kemacetan politik, dengan tujuan untuk mencapai tuntutan revolusioner dan membasmi sisa-sisa rezim lama.

Keputusan oleh Presiden Mesir Muhammad Mursi yang memberikan dirinya sendiri kekuatan baru yang luas telah memicu demonstrasi. Ratusan pengunjung rasa berkumpul di Tahrir Square untuk mengecam langkah yang diambil oleh Mursi itu, meneriakkan "Tinggalkan! Tinggalkan!" dan membandingkan Mursi untuk menggulingkan Hosni Mubarak, yang pemerintahannya 30 tahun berakhir oleh pemberontakan *Arab Spring* Mesir tahun lalu (Birnbaum, 2012). Beberapa mil jauhnya, anggota gerakan Ikhwanul Muslimin, yang merupakan kelompok dimana Mursi berafiliasi, bersatu di depan istana kepresidenan untuk menunjukkan dukungan bagi presiden pertama yang terpilih secara demokratis di negara itu. Suasana di setiap demonstrasi terbentang di berbagai belahan yang dihadapi masyarakat Mesir. Di Tahrir Square, kerumunan sebagian besar liberal, sekuler dan berpendidikan. Di depan istana kepresidenan ada kerumunan yang jauh lebih religius, campuran pendukung Ikhwanul Muslimin berpendidikan dan orang-orang yang pakaiannya compang-camping menunjukkan bahwa harapan mereka bagi bangsa mereka melampaui kemampuan finansial mereka.

Mursi berbicara kepada orang-orang yang bersorak-sorai di depan istana hiasan selama sekitar 45 menit. "Kewajiban saya adalah bergerak maju dengan tujuan revolusi dan menghilangkan semua rintangan di masa lalu yang kita miliki," katanya. Televisi negara melaporkan bahwa kantor Ikhwanul Muslimin dan Partai Kebebasan dan Keadilan di beberapa kota dibakar oleh para demonstran yang marah pada keputusan Mursi. Di kota Alexandria, para demonstran menyerbu markas Ikhwanul Muslimin, mereka melempar buku dan kursi ke jalan dan membakarnya, dilaporkan oleh kantor berita Reuters. Dikatakan para pendukung Mursi dan penentang Mursi juga melemparkan batu satu sama lain di dekat sebuah masjid di Alexandria.

"Mursi hari ini merebut semua kekuasaan negara dan menunjuk dirinya sendiri sebagai Firaun baru Mesir," disampaikan oleh Mohamed El Baradei yakni pemenang

hadiah Nobel Perdamaian dan reformis di dalam postingan pada akun Twitternya (Fleishman & Abdellatif, 2012). Banyak kalangan menilai bahwasanya Mursi dan Ikhwanul Muslimin keluar untuk memonopoli negara seperti yang dilakukan Mubarak dan Partai Demokratik Nasionalnya ketika berkuasa. Perbedaannya adalah bahwa Mursi memajukan agenda Islamis dalam upaya untuk membentuk kembali Mesir dan mengangkatnya ke suara terkemuka di dunia Arab yang berubah. "Keputusan Mursi adalah upaya untuk sepenuhnya mengendalikan kekuasaan negara, yang menunjukkan bahwa Mesir masih dalam kekacauan politik dan ketidakstabilan," kata Nabil Abdelfattah, ahli hukum Al Ahram Pusat Studi Politik dan Strategis. "Dia menjadi penguasa segalanya, kekuasaannya pada kekuatan legislatif dan eksekutif benar-benar berbahaya dan tidak dapat diterima (Fleishman & Abdellatif, 2012).

D. Kudeta Militer Terhadap Mursi

Selama memimpin Mesir, Muhammad Mursi mendapat banyak kritikan terkait cara ia memimpin. Banyaknya permasalahan yang belum terselesaikan di negeri tersebut telah menciptakan polemik di masyarakat. Beberapa pihak tidak dapat menunggu lagi kapan Mursi dapat mengatasi persoalan yang ada seperti persoalan ekonomi serta politik. Seiring polemik yang terjadi tentang kepemimpinan Mursi muncul sebuah kampanye untuk menuntut penurunan Mursi sebagai presiden. Kampanye tersebut diberi nama *Tamarod*. *Tamarod* berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberontakan. Kampanye ini diciptakan sebagai bentuk anggapan bahwa Presiden Mursi sudah tidak mampu lagi untuk memimpin Mesir (Kompas.com, 2012). Dalam menjalankan aksinya *Tamarod* menciptakan sebuah petisi yang berisi tuntutan mereka ada diadakan pemilu kembali sebagai bentuk penurunan Mursi yang dianggap sudah gagal dalam mengelola negara. Petisi tersebut telah ditandatangani lebih dari 22 juta orang sebagai wujud dukungan mereka terhadap upaya penurunan Mursi (Tempo.co, 2013). Dengan begitu jumlah

penandatanganan petisitersebut telah melebihi jumlah pemilih Mursi pada pemilu silam dengan sekitar 13 juta suara.

Pada 30 Juni 2012, masyarakat Mesir turun ke jalan untuk memperingati setahun pemerintahan Mursi. Tetapi dalam memperingati setahun masa jabatan Mursi tersebut sebagai suatu bentuk perayaan. Masyarakat berbondong-bondong turun ke jalan dalam menuntut diturunkannya Muhammad Mursi dari kursi jabatannya. Mursi dianggap gagal sebagai seorang presiden karena tidak mampu membawa perubahan di Mesir. Keesokan harinya, pihak militer mengeluarkan ultimatum kepada Mursi untuk mengundurkan diri atau menghadapi pemberontakan dari masyarakat sipil yang mana dalam tenggat waktu 48 jam pihak Militer akan turun tangan apabila Mursi tidak memenuhi tuntutan dari rakyat. Di hari ketiga yakni pada 3 Juli 2013 pihak Militer melalui Jendral Abdul Fattah Al Sisi mengeluarkan pernyataan resmi bahwa telah mengambil alih kursi pemerintahan Mesir. Pada 4 Juli 2013, Ketua Mahkamah Konstitusi Mesir yaitu Adly Mansour diangkat sebagai presiden transisi mesir hingga diselenggarakannya pemilihan umum guna menentukan Presiden Mesir yang baru.

Menurut Amnesty International, sejak kudeta, pengadilan di Mesir telah menjatuhkan ratusan hukuman mati dan hukuman penjara yang panjang kepada orang-orang tanpa kesempatan pengadilan yang adil. "Hak asasi manusia dikepung di Mesir. Kebebasan berekspresi dilanggar dan dilanggar oleh pasukan keamanan negara dimana protes yang terjadi diselesaikan dengan kekuatan mematikan. Ada penangkapan massal. Jurnalis sedang dijebloskan ke penjara hanya karena melaporkan berita," kata Alex Neve, Sekretaris Jenderal Amnesty International Canada (Mussa, 2016).

Kudeta yang terjadi di tahun 2011 dan di tahun 2012 tentunya berbeda. Sebab pada tahun 2011 kudeta tersebut dilakukan untuk menggulingkan seorang diktator, sedangkan yang terjadi pada tahun 2012 adalah untuk menggulingkan

seorang presiden terpilih yang sah (Varol, 2017). Bagaimanapun Mursi tetap memiliki hak untuk melanjutkan masa jabatannya yang masih seumur jagung. Kudeta yang terjadi terhadap Presiden Mursi yang dipilih berdasarkan pemilu yang sah telah menodai semangat demokrasi di Mesir. Ketika kudeta telah terjadi maka demokratisasi yang dipersiapkan agar dapat berhasil, dengan begitu telah gagal saat kudeta terjadi.

E. Pembatasan Kebebasan Berpendapat

Pada era pemerintahan Al Sisi, media maupun berbagai pihak yang mendukung kelompok Ikhwanul Muslimin akan dijatuhi hukuman oleh pihak yang berwenang (Willis & Fellow, 2017). Penangkapan yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk dari disahkannya undang-undang anti terorisme yang berlaku di Mesir. Pada hari Minggu 16 Agustus 2015, Al Sisi menandatangani undang-undang anti terorisme. Disahkannya undang-undang anti terorisme tersebut merupakan tindakan pemerintah dalam membungkam perbedaan pendapat (Fahim & Thomas, 2015).

Undang-undang anti terorisme dikeluarkan sebagai respon dari tewasnya jaksa senior Hisham Barakat serta adanya operasi militer di Semenanjung Sinai (Haryono, 2015). Undang-undang yang disahkan tersebut menuai kontroversi dari sejumlah kalangan karena dianggap sebagai perluasan atas kekuasaan pemerintah. Dalam undang-undang tersebut siapapun pihak yang menyebarkan atau melaporkan berita yang salah sehingga menyimpang dari pernyataan pemerintah akan dikenai denda minimal 200.000 pound Mesir hingga maksimal sebesar 500.000 pound Mesir perihal laporan mengenai operasi keamanan terhadap kelompok bersenjata (Aljazeera, 2015). Selain denda pihak penyiar berita dapat dikenakan hukuman penjara apabila berita yang disampaikan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Bagi siapapun yang terlibat dalam organisasi atau kelompok yang memiliki kaitan dengan terorisme akan dijerat juga

dengan hukuman penjara serta dijatuhi hukuman mati jika terbukti memimpin atau mendirikan organisasi teroris.

Diterbitkannya undang-undang anti terorisme dikhawatirkan akan membatasi hak-hak masyarakat dalam mengeluarkan pendapatnya. Pendapat masyarakat yang seharusnya bisa diakomodir oleh pemerintah, justru malah dibatasi dengan adanya undang-undang tersebut. Kebebasan media dalam memberitakan sesuatu merupakan sesuatu yang harus dijaga oleh pemerintah. Pemerintah tidak dapat mengekang kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya. Keinginan pemerintah agar media massa yang ada untuk memiliki kesamaan dengan pemerintah tentu tidak dapat diterima oleh masyarakat. Dengan adanya paksaan atau intervensi dari pemerintah terhadap pemberitaan mana yang memiliki kelayakan dan mana yang tidak, menjadikan pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam mengontrol media. Pemerintah tentu memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menggiring opini terhadap sentiment yang ada di masyarakat terhadap pemerintah.

Jurnalis menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya di Mesir Presiden Abdel-Fattah el-Sissi, kelompok pengawas mengatakan bahwa angka tertinggi di balik jeruji sejak mulai menyimpan catatan pada tahun 1990. Dalam sebuah laporan yang merinci penahanan 18 warga Mesir, CPJ (*Committee to Protect Journalists*) yang bermarkas di New York mengatakan sebagian besar dituduh berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin yang digulingkan sekarang oleh Presiden Muhammad Mursi yang digulingkan (Cbsnews.com, 2015).

Dikatakan bahwa ancaman pemenjaraan di Mesir adalah bagian dari atmosfer yang mencekik di mana pihak berwenang menekan saluran media untuk menyensor suara-suara kritis dan mengeluarkan gag order pada topik-topik sensitif. Dikatakan Al Sisi telah meminta keamanan nasional untuk menginjak-injak kebebasan. "CPJ berbicara kepada pejabat

tingkat tinggi, termasuk jaksa penuntut umum dan menteri keadilan transisional, yang menyangkal bahwa Mesir menahan wartawan di penjara terkait dengan pekerjaan mereka," kata kelompok itu dalam laporan, yang didasarkan pada 1 Juni sensus penjara Mesir. "Tapi penelitian CPJ menunjukkan bahwa pemerintah Al Sisi.. telah menggunakan dalih keamanan nasional untuk menindas hak asasi manusia, termasuk kebebasan pers."

Pasca kudeta yang dilakukan terhadap Mursi, pihak berwenang telah melakukan tindakan keras terhadap Ikhwanul Muslimin dan pihak oposisi lainnya, menewaskan ratusan, memenjarakan ribuan orang dan memicu serangan balik terhadap pasukan keamanan, sebagian besar di Semenanjung Sinai yang bergolak. Aktivis mengatakan puluhan wartawan lagi telah ditahan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa sebagian besar dipenjara karena meliput protes, menayangkan pandangan yang bertentangan dengan pemerintah atau melaporkan ketidakadilan yang dilakukan terhadap orang-orang yang berafiliasi dengan Ikhwan, yang dianggap Mesir sebagai organisasi teroris.

Beberapa orang dituduh "menyebarkan kekacauan," sementara yang lain dituduh menyebarkan "berita palsu" atau pesan anti-pemerintah. Didalam suatu kasus yang menjadi sorotan yakni Mahmoud Abou-Zeid yang ditangkap pada Agustus 2013 saat mengambil foto-foto pembubaran kekerasan terhadap aksi pro-Morsi, di mana ratusan Islamis tewas. Dia telah berada dalam penahanan pra-ajudikasi sejak itu dan belum secara resmi dituntut.

Dalam kasus lain, fotografer Omar Abdel-Maksoud ditangkap pada tahun 2014 saat meliput baby shower untuk seorang wanita yang telah ditahan dan dipaksa untuk melahirkan di rumah sakit dengan tangan diborgol. Polisi melancarkan serangan dahsyat terhadap pertemuan itu, kata laporan itu, mengutip media lokal. CPJ mengutip kasus-kasus jurnalis menghilang ke labirin fasilitas penahanan Mesir tanpa

pengacara atau anggota keluarga yang mengetahui di mana mereka berada, dengan sidang pengadilan kadang-kadang terjadi tanpa sepengetahuan mereka.

Dikatakan pembatasan berat berarti bahwa informasi langka muncul dari seluruh wilayah, terutama Sinai, di mana kelompok militan memerangi pasukan keamanan dan sedikit yang diketahui tentang korban konflik pada warga sipil. Seorang wartawan dari daerah itu, Saeed Abuhaj, ditangkap karena membawa selebaran bertuliskan slogan-slogan Ikhwanul Muslimin, kata pengacaranya. Dia dituduh menghasut kekerasan dan menggunakan senjata melawan polisi. Beberapa kasus yang melibatkan kampanye negara terhadap jurnalis telah menarik perhatian internasional, yang terakhir dari Ahmed Mansour, seorang wartawan untuk penyiar Al-Jazeera yang berbasis di Qatar, yang dihentikan di Jerman ketika petugas di sana bertindak atas perintah penangkapan Mesir.

Setelah menahannya akhir pekan lalu, jaksa Jerman memutuskan hari Senin untuk membebaskannya dan tidak mengejar ekstradisinya ke Mesir, di mana dia dinyatakan bersalah pada 2011 atas tuduhan penyiksaan yang dibantahnya. CPJ dan Reporter Prancis Without Borders mengkritik penahanan tersebut. Al-Jazeera telah menjadi fokus utama Mesir setelah penggulingan Morsi, karena pemerintah saat ini melihatnya sebagai juru bicara untuk Ikhwan. Tiga wartawan dari saluran berbahasa Inggrisnya sedang diadili dengan tuduhan menjadi bagian dari kelompok teroris dan menyiarkan rekaman palsu. Salah satu dari tiga, wartawan Australia Peter Greste, telah dideportasi.

Dalam merespon unjuk rasa yang terjadi di Mesir. Pemerintahan Al Sisi bertindak sangat represif dimana kebanyakan aksi demonstrasi berakhir dengan bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Tidak jarang bentrokan tersebut mengakibatkan korban di kedua pihak baik pihak demonstran maupun pihak keamanan. Kudeta yang

dilakukan angkatan bersenjata terhadap Mursi menciptakan kegaduhan diantara masyarakat. Masyarakat terbagi menjadi dua kelompok yakni kelompok pro Mursi dan kelompok anti Mursi. Demonstrasi yang sering terjadi di era Al Sisi kebanyakan didominasi oleh masyarakat yang tidak setuju dengan penggulingan Mursi dari jabatannya sebagai Presiden Mesir yang sah di mata hukum.